

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Darwan Prinst, *Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Surabaya, Bina ilmu, 1987.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2010.

**Jurnal :**

Agus Suntoro, *Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Hukum, 2020.

Aulia Rosa Nasution, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Jurnal, Universitas Medan Area, 2018.

Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Akademika dan Praktisi Hukum, Jakarta, 2014.

Bima Jati dan Gilang Rizki Aji Putra, *Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Cekli Setya Pratiwi, *Analisa Muatan Materi Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum Indonesia*, Jurnal, Fakultas Syariah, Universitas Raden Intan Lampung.

Eko G. Samudro dan M. Adnan Madjid, *Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional*, Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Pertahanan, 2020.

Henni Muchtar, *Analisis yuridis normatif sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2015.

H.Saripudin, *Kajian terhadap Peraturan Daerah bermasalah dari sudut pandang Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Gama Mahakam Samarinda, 2010.

I Komang Kertiyasa dan I Made Pujawan, *Pengaturan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Vaksin Palsu*, jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana Bali.

Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, *Hak Asasi Manusia di Indonesia Menuju Democratic Governances*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2005.

Muh Hasrul, *Aspek yuridis pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2020.

Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Riska Ari Amalia & M.Saoki Oktava, *Telaah polemik pembatasan social berskala besar ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2020.

R. Julio Prasetyo, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Jurnal, Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

S. Masribut Sardol, *Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2014.

Sri Heryati, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*, Jurnal, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, 2020.

Suparman Marzuki, *Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Susani Triwahyuningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum, Universitas Merdeka Ponorogo, 2018.

Vidia Reski Awalia, Mappamiring, dan Andi Nuraeni Aksa, *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara*, Jurnal, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*, Jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

**Skripsi :**

Nur Indah Sari, *Tindak pidana pengedaran vaksin palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukum islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

**Media Elektronik :**

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/11/1404/herd-immunity-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.html>

<https://puspensos.kemsos.go.id/covid-19-dan-bencana-nasional>

<https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia->

<https://www.trenasia.com/vaksin-corona-dari-china-antara-fatamorgana-dan-realita/>

<https://kontras.org/2020/05/11/15985/>

<https://guruppkn.com/dasar-hukum-ham>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-39-1999-hak-asasi-manusia>

<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/298718/bukan-pidana-komnas-ham-usul-sanksi-sosial-bagi-yang-bekerumun>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/25/07020771/komnas-ham-usul-sanksi-denda-dan-kerja-sosial-bagi-yang-enggan-bubarkan-diri?page=all#page3>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/19/07045781/4-fakta-soal-gugatan-atas-perda-yang-larang-warga-dki-tolak-vaksinasi?page=all#page2>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fdb2a6120fd8/advokat-ini-gugat-perda-dki-penanggulangan-covid-19-ke-ma?page=all>

<https://tirto.id/betapa-berlebihan-menjatuhkan-sanksi-untuk-penolak-vaksin-covid-19-f8Zk>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff87cde4fe56/pidana-denda-bagi-penolak-vaksinasi-harusnya-diatur-level-uu?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ff87cde4fe56/pidana-denda-bagi-penolak-vaksinasi-harusnya-diatur-level-uu?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fbb4dcb25bae/menolak-vaksinasi-covid-19-bisakah-dipidana/>

<https://www.republika.co.id/berita/qmx12x328/ancaman-bagi-penolak-vaksin-bentuk-pelanggaran-ham-part1>

<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13875017/penerapan-denda-bagi-masyarakat-yang-menolak-disuntik-vaksin-covid-19-dinilai-kurang-tepat?page=2>

<https://icjr.or.id/icjr-minta-agar-pemerintah-pusat-dan-daerah-tinjau-ulang-ketentuan-pidana-untuk-perbuatan-menolak-vaksin/>

<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/371859/kewajiban-vaksin-covid-19-digugat-epidemiolog-benahi-komunikasi>

<https://news.detik.com/kolom/d-5333408/hak-asasi-dan-kewajiban-vaksinasi>



